



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **INDRA PRIYO SUSENO**
2. Jabatan : **PEJABAT PENGUJI/PENANDATANGAN SPM (PPSPM)**
3. NHK : **271623**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.865.000.000**

1. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 160.000.000
2. Tanah Seluas 424 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL
SENDIRI Rp. 130.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 177 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
4. Tanah Seluas 190 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL
SENDIRI Rp. 175.000.000
5. Tanah Seluas 316 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL
SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah Seluas 218 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL
SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **697.337.500**

1. MOBIL, TOYOTA LANDCRUISER Tahun 1980, HASIL SENDIRI
Rp. 120.000.000
2. MOTOR, HONDA NF11B1D M/T Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
3.837.500
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 410.000.000
4. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
163.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	162.660.782
F. HARTA LAINNYA	Rp.	175.175.709
Sub Total	Rp.	2.900.173.991
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.900.173.991

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.